

**TESIS**

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYUSNAN ANGGARAN PADA  
BIDANG PRASARANA DAN SARANA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Diajukan Oleh :**

**RAKHSAN R**

**NIM : 4620104006**

**UNIVERSITAS**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2022**

### HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : 19 Agustus 2022.

Tesis Atas Nama : Rakhsan R

NIM : 4620104006

Telah Diterima Oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pada Proram Studi Manajemen

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Miah Said, S.E, M.Si

(Pembimbing 1)

Sekretaris : Dr. Muh. Kafrawi Yunus, SE, M.M

(Pembimbing 2)

Anggota Penguji : 1. Dr. Firman Menne, SE, M.Si.Ak

2. Dr. Thamrin Abduh, SE, M.Si

Makassar, 19 Agustus 2022

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M. Si

NIDN. 0005086301

**HALAMAN PENERIMAAN**

Pada Hari / Tanggal :  
Tesis Atas Nama : Rakhsan R  
NIM : 4620104006

Telah Diterima Oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pada Proram Studi Manajemen

**PANITIA UJIAN TESIS**

Ketua : Dr. Miah Said, S.E, M.Si (.....)  
(Pembimbing 1)  
Sekretaris : Dr. Muh. Kafrawi Yunus, SE, M.M (.....)  
(Pembimbing 2)  
Anggota Penguji : 1. Dr. Firman Menne, SE, M.Si.Ak (.....)  
2. Dr. Thamrin Abduh, SE, M.Si (.....)

Makassar, .....

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M. Si

NIDN. 0005086301

### PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhsan R

Nim : 4620104006

Program Studi : Magister Manajemen

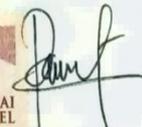
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran  
Pada Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian  
Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis penelitian yang saya serahkan  
melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



  
Rakhsan R

## PRAKATA



Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah yang senantiasa tercurahkan kepada penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, dalam rangka memperoleh gelar magister S2 pada program Studi Manajemen Kekhususan Manajemen Sumber Daya Manusia Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur.

Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka yang meliputi tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Bab III Metode Penelitian yang meliputi desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi gambaran umum perusahaan, penyajian hasil penelitian dan pembahasan. Bab V yang meliputi kesimpulan dan saran.

Penulis menyadari bahwa selama ini merampungkan tesis ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang dihadapi, akan tetapi dengan pertolongan

Allah Swt, yang datang lewat dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga seluruhnya dapat teratasi dengan baik. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si, Rektor Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan di Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak Dr. Hasanuddin Remmang, M.Si, Ketua Program studi manajemen Program Pascasarjana Universitas Bososwa Makassar selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya.
4. Bapak Dr. Miah Said, SE, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta nasehatnya kepada penulis.
5. Bapak Dr. Kafrawi Yunus, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta nasehatnya kepada penulis.
6. Bapak Dr. Firman Manne, SE., M.Si. AK selaku penanggap I yang telah memberikan kritikan dan saran serta nasehatnya kepada penulis.
7. Bapak Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si selaku penanggap II yang telah memberikan kritikan dan saran serta nasehatnya kepada penulis.

8. Segenap dosen pengajar dan staf kantor Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, khususnya pada Program Studi Manajemen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik bagi penulis.
9. Kepala Dinas PMPTSP dan jajarannya, atas kesediaannya menerima dan memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
10. Bapak Ragusman Lukman W, S.Kom yang selalu memberikan masukan serta saran terhadap sudut pandang perencanaan ruang lingkup Kabupaten Luwu Timur.
11. Bapak Muzakkir, S.Ag yang selalu memberikan teguran kepada penulis agar untuk tidak meninggalkan kewajiban manusia selagi masih hidup.
12. Adinda Abdullah Mursyd Al Anshori, SE., M.Pd yang selalu mendampingi penulis untuk menyelesaikan Tesis dan Bisnis yang bisa dilakukan untuk membuka lowongan pekerjaan kepada adik-adik yang membutuhkan pekerjaan
13. Kepada seluruh keluarga besar penulis atas segala dukungan dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.
14. Serta kepada orang-orang yang tak sempat penulis tuliskan satu-persatu. Terima kasih sudah mau mengenal penulis dan sempat bertegur sapa.

Terkhusus dan terspesial buat ibunda saya Hj. Sati yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan anaknya untuk menggapai segala harapan yang ingin dicapai dan tak ketinggalan khususnya untuk keluarga kecil saya yaitu ibu patmawati beliau adalah istri saya yang mungkin bisa menjadi penyemangat penulis untuk menggapai harapan-harapan yang ingin penulis capai, beliau tidak

pernah mengeluh sedikitpun bahkan selalu hadir untuk memberikan semangat ketika penulis merasa gagal dalam pencapaian hal/target yang ingin di capai, namun rasa bahagia penulis belum lengkap jika penulis tak mengikut sertakan kebahagiaan penulis dalam penyelesaian tesis ini tidak mencantumkan nama anak-anak penulis yaitu Anak Pertama Aulia Az-zahra (Anak Pertama) Muh. Raghfa Ramadhan (Anak Kedua) dan Adila Nisa Ardani (Anak Ketiga) yang dimana dengan setiap melihat senyumlah penulis merasa bahagia dan serasa apa yang menjadi letih sehabis beraktivitas akan hilang begitu saja seketika penulis melihat senyum bahagia mereka dan pada kesempatan ini penulis menitip doa kepada Anak-anak penulis untuk selalu senantiasa berbakti kepada orang tua.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan tesis ini sebagai saham di dunia pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mendapat Ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Malili, Mei 2022

Rakhsan R

## ABSTRAK

**Rakshan R**, Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (di bimbing oleh Miah Said dan Kafrawi Yunus).

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Evaluasi Kinerja Context dalam Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian. 2) Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Evaluasi Kinerja Input dalam Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian. 3) Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Evaluasi Kinerja Process dalam Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian. 4) Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Evaluasi Kinerja Product dalam Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian. Fakta yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Metode yang digunakan langsung ditinjau langsung di tempat responden berkegiatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan program didasari oleh kebutuhan masyarakat/petani yang berada di Kabupaten Luwu Timur, selain kebijakan program berdasarkan kebutuhan masyarakat kebijakan program sangat ditentukan dengan kekuatan keuangan daerah, mengingat dalam Pemerinrah Kabupaten tidak hanya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dengan demikian variabel di teliti sudah terjawab bahwa kebijakan sebuah program ditentukan oleh Kebijakan Kepala daerah dan legislative dengan mempertim-bangkan kekuatan keuangan daerah.

**Kata kunci:** *Kinerja context, kinerja input, kinerja proses, output, dan ebijakan Program*

## **ABSTRACT**

**Rakshan R**, *Evaluation of Budget Preparation Program Policies in the Field of Infrastructure and Facilities of the East Luwu Regency Agriculture Service (supervised by Miah Said and Kafrawi Yunus).*

*The aims of this research are: 1) To describe and analyze the Context Performance Evaluation in Program Policies in the field of Infrastructure and Facilities at the Department of Agriculture. 2) To describe and analyze the performance evaluation of inputs in program policies in the field of infrastructure and facilities at the Department of Agriculture. 3) To describe and analyze the evaluation of process performance in program policies in the field of infrastructure and facilities at the Department of Agriculture. 4) To Describe and Analyze Product Performance Evaluation in Program Policies in the field of Infrastructure and Facilities at the Department of Agriculture. The facts used are primary data and secondary data. The sample in this study were 5 people. Data was collected through interviews. The method used was directly reviewed at the respondent's place of activity. The test results show that the program provisions are based on the needs of the community/farmers in East Luwu Regency, in addition to program policies based on community needs, program policies are largely determined by regional financial strength, considering that the Regency Government is not only the Department of Agriculture and Food Security. Thus, the variables examined have been answered that the policy of a program is determined by the Regional Head Policy and the legislature by taking into account the strength of regional finances.*

**Keywords:** *Context performance, input performance, process performance, output, and program policy*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
PERNYATAAN KE ORSINILAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Birokrasi .....	15
1. Teori Birokrasi .....	15
2. Teori Anggaran Tradisional .....	16
B. Konsep Evaluasi .....	17
1. Definisi Evaluasi .....	17

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi .....	19
3. Indikator Evaluasi ... ..	21
4. Model-Model Evaluasi .....	22
C. KONSEP EVALUASI PROGRAM .....	25
1. Definisi Evaluasi Program .....	25
2. Langkah-Langkah Evaluasi Program .....	27
3. Model-Model Evaluasi Program .....	30
D. KONSEP EVALUASI KEBIJAKAN .....	33
1. Definisi Evaluasi Kebijakan .....	33
2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan .....	34
3. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik .....	35
E. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK .....	36
1. Definisi Kebijakan Publik .....	36
2. Proses Pembuatan Kebijakan .....	39
3. Kerangka Kerja Kebijakan Publik .....	41
4. Teknologi Pertanian .....	42
5. Teknologi Dalam Masyarakat .....	43
F. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF TEKNOLOGI PERTANIAN	43
1. Dampak Positif .....	43
2. Dampak Negatif .....	44
3. Program Bantuan Handtraktor .....	45
G. Penelitian Terdahulu .....	46

H. Kerangka Pikir .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Gambaran Definisi Operasional .....	51
D. Narasumber dan Informan .....	54
E. Jenis Sumber Data .....	54
F. Teknik Pengumpulan Data .....	55
G. Teknik Pengolahan Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN .....	58
B. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>102</b>
A. KESIMPULAN .....	102
B. SARAN .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

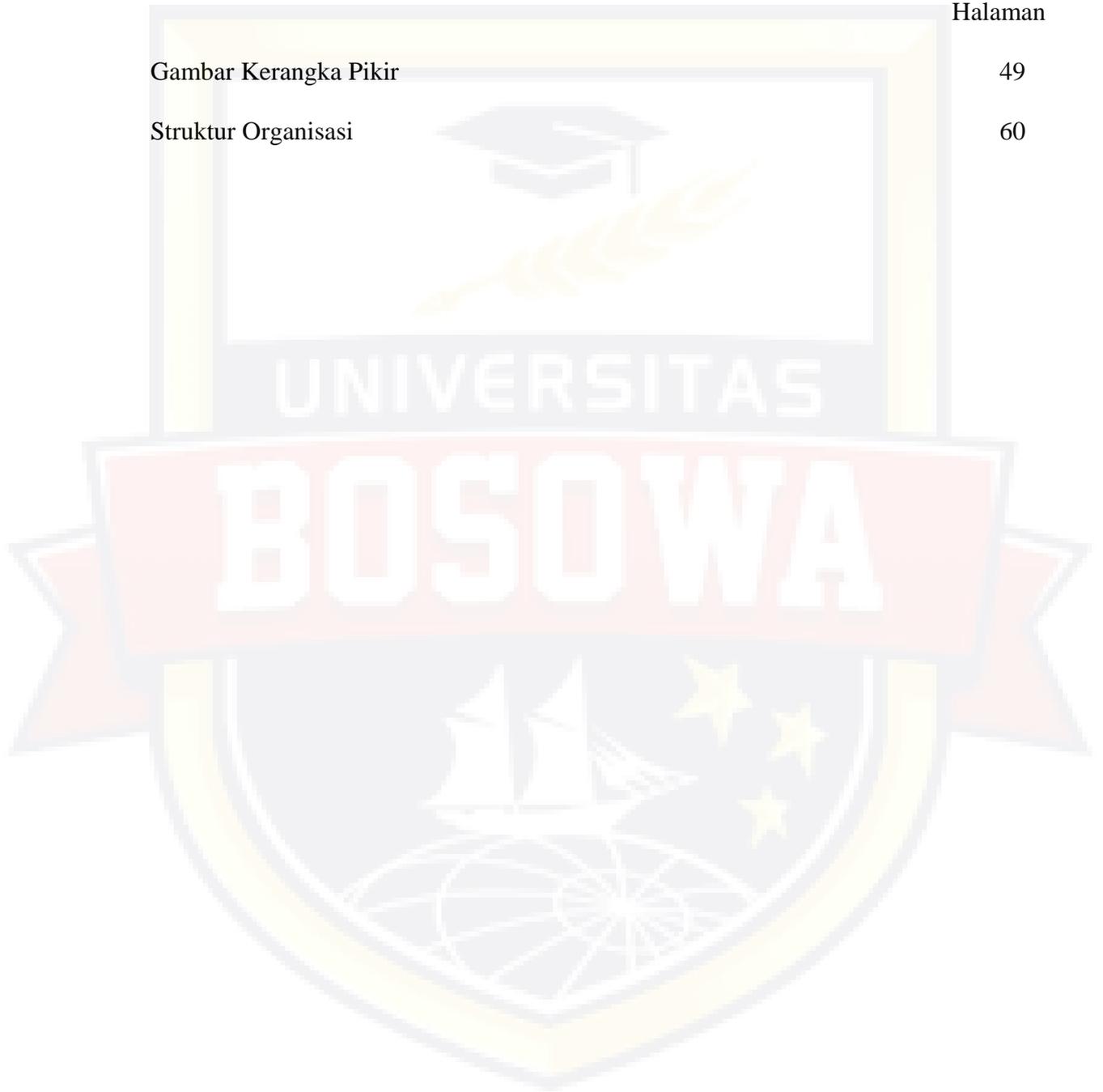
	Halaman	
A	Tabel Pagu Anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017- 2021	6
B	Tabel Definisi Operasional Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.	52

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## GAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar Kerangka Pikir	49
Struktur Organisasi	60





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan (Mediaty dan Syarifudin, 2010). Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Mediaty dan Syarifudin, 2010).

Penyusunan Anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah selalunya dilakukan secara cermat dengan melihat sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disistematiskan oleh perencanaan sesuai dengan kebutuhan instansi dalam mengembangkan pembangunan daerah. Selain melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya masih ada beberapa alokasi bantuan keuangan yang lainnya, untuk mengembangkan pembangunan daerah.

Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah yang terjadi secara bersamaan, baik sosial, dan politik di berbagai daerah. Permasalahan tersebut antara lain meningkatnya jumlah penduduk

miskin dan pengangguran, melemahnya kegiatan produksi dan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, menurunnya pelayanan prasarana dan sarana umum akibat mengecilnya penerimaan pemerintah daerah termasuk PAD, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menurunnya ketentraman masyarakat terhadap birokrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Mansyur 2004). Berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut diantaranya adalah dengan menganalisa sistem keuangan daerah termasuk didalamnya sistem penganggarannya (*budgetary*) Menurut Nordiawan (2006: 48).

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi penting anggaran.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilaksanakan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan

tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Arniati *et al.* 2010).

Berbicara mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terbitnya permendagri 90 thn 2020 dan perubahan kepmen 50 tahun 2021 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Dalam pengelolaan Anggaran, program pemerintah dalam pembangunan yang strategis harus selalu berpedoman terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam sektor pengelolaan anggaran, agar setiap pengalokasian anggaran yang akan digunakan sudah tepat pada segi sasaran maupun dari segi administrasian.

Sementara itu, pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur semenjak tahun anggaran 2021 telah menerapkan anggaran dengan pendekatan kinerja. Di dalam proses penyusunan anggarannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur secara operasional mendasarkan pada permendagri 90 thn 2020 dan perubahan kepmen 50 tahun 2021. Proses penyusunan anggaran merupakan suatu proses krusial, dimana dalam proses tersebut menyangkut proses penentuan jumlah alokasi dana bagi tiap-tiap

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk satu tahun yang akan datang. Karena proses penyusunan anggaran merupakan proses yang krusial, maka proses tersebut seharusnya selalu dilakukan evaluasi sehingga kedepannya akan semakin baik. Apalagi sampai saat ini masih banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur bahwa anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah.

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah kabupaten yang sangat baru namun sudah memiliki banyak prestasi, baik dari segi Pembangunan maupun dari segi Pertaniannya. Kabupaten Luwu Timur terlahir pada tahun 2003 yang dimana usulan itu sudah di rencanakan oleh masyarakat setempat selama 44 tahun lamanya, hal itu dapat terjadi karena masyarakat beralasan bahwa banyak potensi daerah tersebut dapat dikelola oleh masyarakat setempat.

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas daerah 6.945 km<sup>2</sup> yang dimana terdiri dari 11 Kecamatan 124 Desa dan 3 Kelurahan. Pada wilayah 11 Kecamatan Kabupaten Luwu Timur semuanya memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Dari hal tersebut kita melihat bahwa struktur tanah pada kabupaten Luwu Timur cukup baik dan strategis untuk lahan pertanian. Kabupaten Luwu Timur memiliki Lahan sawah seluas 26.487 hektar yang terdiri dari 24.843 hektar sawah irigasi, 1.609 hektar sawah tadah hujan dan 35 hektar sawah pasang surut. Tahun 2016, produksi padi sawah di Luwu Timur mencapai 307.265,92 ton dari luas panen sebesar 42.910 hektar. Lahan kering di Kabupaten

Luwu Timur diantaranya digunakan untuk rumah/pekarangan, tegal/kebun, ladang/huma, tanah gembala/padang rumput, rawa-rawa yang tidak ditanami, tambak, kolam/tebat, lahan sementara yang tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya. Persentase penggunaan lahan kering di Kabupaten Luwu Timur yang paling banyak adalah untuk hutan Negara, yakni sebesar 36,97 persen.

Tanaman-padi Rata-rata Produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 sebesar 71,61 Ton/Ha dengan luas panen sebesar 42.810 Ha dan produksi 307.265,92 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah Kecamatan Wotu dengan total produksi sebesar 62,14 ribu ton.

Komoditi tanaman pangan yang dihasilkan Kabupaten Luwu Timur adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Dibandingkan dengan tahun lalu produksi komoditi tersebut mengalami kenaikan hampir di setiap komoditi kecuali kacang kedelai dan kacang hijau yang mengalami penurunan produksi.

Berdasarkan tingginya peluang dari sektor pertanian pada Kabupaten Luwu Timur tentunya membuat tantangan tersendiri untuk kepala daerah agar dalam sektor pertanian ini dapat meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat dan daerah. Oleh sebab itu berikut gambaran pagu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Khususnya pada bidang prasarana dan sarana pertanian.

**1.1 Tabel Pagu Anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Rincian Anggaran Pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian						
		Pagu Dinas Pertanian	Seksi Lahan Dan Irigasi (Rp)	%	Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan (Rp)	%	Seksi Pembiayaan Dan Investasi (Rp)	%
1.	2017	64,610,833,599	32,613,951,650	50.5	2,005,769,500	3.1	159,048,200	0.24
2.	2018	60,402,490,502	22,169,193,253	36.7	3,083,888,500	5.1	56,755,000	0.09
3.	2019	58,722,234,355	8,411,289,086	14.3	5,367,933,654	9.14	333,855,000	0.56
4.	2020	41,400,377,795	12,031,632,917	29.1	76,448,000	1.84	168,322,000	0.40
5.	2021	54,583,463,412	16,762,697,751	30.7	839,950,000	1.53	167,362,345	0.3

*Sumber : Dinas Pertanian*

Berdasarkan pada tabel 1.1 Diatas yang menggambarkan tentang Pagu Anggaran Bidang Prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021, terlihat besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanian Khususnya pada bidang Prasarana dan sarana pertanian, yang dimana dari 2017-2021 hampir 50% anggaran yang melekat pada Dinas Pertanian berada pada bidang Prasarana dan sarana pertanian. Hal itu disebabkan oleh dimana Bidang Sarana Dan Prasara merupakan inti dari sektor Dinas Pertanian yang dimana Dinas Pertanian itu sendiri memiliki 6 Bidang ditambah 1 Sekretraiat. Pada Tabel diatas kita juga melihat pada Tahun 2020 pada

Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan terdapat Anggaran yang menurun sangat tinggi hal itu disebabkan bahwa apa yang menjadi program prioritas Bupati terpilih pada periode Tahun 2016-2021 telah memenuhi dan bisa narasikan melebihi apa yang menjadi target sehingga anggaran yang tinggi pada kasi tersebut di alihkan pada program prioritas yang belum terselesaikan. Sedangkan pada Tahun 2021 telah terjadinya peningkatan yang disebabkan oleh, pada Tahun 2021 merupakan Tahun Transisi pergantian periode sehingga hal yang menjadi tolak ukur perencanaan pada Dinas Pertanian adalah hasil survey dan proposal masuk pada Dinas Pertanian pada Tahun 2020.

Besarnya hasil pertanian yang disumbangkan oleh petani pada Kabupaten Luwu Timur tentunya tidak bisa dinikmati secara maksimal dan oleh hal itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum mendapatkan target yang diharapkan, diantaranya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat petani untuk menikmati hasil pertanian yang dikelolanya. Faktor penghambat diantaranya adalah masih ada beberapa petani yang gagal dalam panen padi, hal itu disebabkan belum menemukannya cara yang inovatif dalam menghilangkan/meminimalisir hama yang ada pada lahan pertanian.

Masyarakat juga menilai adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya terhadap sektor pertanian bidang prasaran dan sarana. Dimana hal itu ditandai dengan tingginya pagu Anggaran yang dimiliki bidang prasaran dan sarana namun belum bisa mengangkat sektor hasil pertanian yang diharapkan oleh masyarakat.

Diskriminasi yang dilakukan oleh bidang prasarana dan sarana adalah pengadaan Alsintan yang diberikan kepada kelompok tani terasa tidak adil, hal itu dirasakan ada beberapa kelompok tani yang berulang kali mendapatkan Alsintan dari prasaran dan sarana dan ada juga kelompok tani yang sudah berusaha mengajukan permohonan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian namun belum pernah terkabulkan, namun jika dilihat dari hasil dari pertanian dari yang telah mendapatkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan tidak mendapatkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) tidak jauh berbeda bahkan bisa diartikan penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pada kelompok tani yang mendapatkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) tidak dipergunakan secara maksimal.

Masyarakat juga mengeluhkan tingginya dan sulitnya bahan kebutuhan pertanian yang ada pada Kabupaten Luwu Timur, Hal itu dirasakan ketika masa cocok tanam terkadang Bahan yang dibutuhkan (pupuk) tidak tersedia di daerah tersebut dan jika kalaupun ada pasti harganya sangat tinggi, hal itu membuat petani menjadi kebingungan karena jika tidak digunakan akan menghambat pertumbuhan pertanian namun jika di beli tentunya akan membutuhkan pengeluaran yang tak sedikit sedangkan hasil dari pertanian (gabah) dijual sangatlah murah.

Pemerataan pembangunan daerah masih sulit juga didapatkan oleh masyarakat ditandai dengan adanya pembangunan jalan produksi (JAPRO) dan jalan usaha tani (JUT) yang dibangun di daerah tertentu sering didapatkan

bahkan setiap tahunnya selalu mendapatkan pembangunan namun ada juga daerah tertentu yang sudah mengusulkan pembangunan, baik menggunakan jalur Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan, Rencana Kerja (RENJA) dan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Anggota Dewan, masih belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Hal itu membuat polemik pada masyarakat, mengacu pada anggaran yang cukup besar yang terdapat pada Dinas Pertanian terkhusus pada Bidang Prasarana dan Sarana akan tetapi belum bisa merealisasikan usulan pembangunan pada daerah tersebut. Usulan tersebut juga tentunya memiliki dasar bahwa lahan pertanian/perkebunan masyarakat di daerah tersebut sangatlah luas dan hasilnya juga sangat melimpah, tentunya pemerataan pembangunan sungguh sangatlah diharapkan agar masyarakat dapat memaksimalkan/memudahkan akses mobilitas dalam pengangkutan hasil pertanian/perkebunan masyarakat. Namun dari dampak tidak adanya pemerataan pembangunan bisa saja masyarakat akan meninggalkan ladang pertanian/perkebunannya, tentunya dengan alasan akses/medan yang dilaluinya sangatlah sulit sehingga membuat mobilitas pengangkutan dari hasil pertanian/perkebunan masyarakat tidak bisa menjangkaunya dan tentunya akan berimbas pada pendapatan masyarakat.

Disamping itu, masih banyak pula masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang mempertanyakan mengenai pengalokasian anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Jika Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki *governance* yang bagus, seharusnya

juga menghasilkan *outcome* yang bagus.

Kabupaten Luwu Timur belum bisa mengelola anggarannya secara maksimal dalam artian masih terdapat anggaran yang diletakan pada Dinas pertanian belum bisa mengangkat perekonomian terkhusus sektor pertanian pada Kabupaten Luwu Timur. Hal itu sangat terlihat begitu jelas pada masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang dimana pada pengelolaan tanaman padi mulai dari penanaman hingga hasil panen masih sangat bergantung pada kabupaten lain. Hal ini bisa dilihat pada kelompok tani (KOPTAN) yang dibentuk oleh masyarakat yang di sahkan oleh Desa masih terikat oleh sistem yang digunakan oleh Daerah lain.

Hasil dari pertanian Kabupaten Luwu Timur belum dapat meningkatkan pendapatan para petani Kabupaten Luwu Timur, yang dimana hasil pertanian (Padi) masih di jual mentah pada Daerah Lain, yang dimana hal itu terjadi karena adanya ikatan yang dilakukan oleh petani terhadap pengepul dari Luar Daerah Luwu Timur yang berisikan jika alsinta Pengepul Daerah yang digunakan maka hasil panen petani di beli oleh Pembeli oleh Daerah Lain dengan harga yang telah ditentukan oleh pembeli dari daerah lain yang digunakan Alsintannya.

Penjualan hasil pertanian yang masih mentah tentunya sangat merugikan sektor pertanian itu sendiri, dimana Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas, dimana hal itu jiam dikelola secara maksimal antara pemerintah dan petani tentunya dapat meningkatkan

perekonomian petani dan dari pemerintah pastinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adanya tuntutan pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran, maka dalam hal ini diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya (Wulandari, 2011). Di samping memberikan informasi kepada atasan, bawahan juga harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran ini diperlukan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

Proses penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran yang menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk menyiapkan nilai sumber ekonomi yang disediakan bagi setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban guna melaksanakan perannya masing-masing. Dengan adanya anggaran maka manajemen dapat membandingkan dan menganalisa biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan, yang dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan. Karena anggaran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana, pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penyusunan anggaran dan

kepemimpinan sangat penting dalam sebuah organisasi, anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang terdapat dalam anggaran belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Anggaran terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional pemerintahan karena bersifat rutin atau terjadi terus menerus. Belanja ini penting karena belanja barang dan jasa berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan secara keseluruhan, biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pemberian jasa-jasa kepada setiap fungsi pemerintahan. Maka penyusunan anggaran perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah dalam penyusunan anggaran cukup efektif sebagai alat pengendalian manajemen. Sehubungan dengan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah **“Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Kinerja Context Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian?
2. Bagaimana Evaluasi Input Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian?
3. Bagaimana Evaluasi Proses Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian?
4. Bagaimana Evaluasi Output Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur” dengan menggunakan teori “*CIIP Evaluation Model*” yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1967) dalam Arikunto (2014) yakni:

1. Manfaat Penelitian Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Evaluasi Kinerja Context dalam Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Evaluasi Kinerja Input dalam Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian.

3. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Evaluasi Kinerja Process dalam Kebijakan Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat teoritis**

Menambah pengetahuan dan keilmuan bidang kebijakan publik Dalam rangka pengembangan teori yang telah di peroleh selama perkuliahan Menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

##### **b. Manfaat Praktis**

Bagi instansi terkait, manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu referensi bagi pelaksana Program pada bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. BIROKRASI**

##### **1. Teori Birokrasi**

Teori birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses didalam organisasi. Para teoritikus klasik seperti Weber (1948) selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektifitas administrasi organisasi, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan enam karakteristik struktural.

Pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi menggambarkan pengembangan kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktifitas organisasi.

Kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktifitas pekerja dalam melaksanakan tugas yang rumit kedalam tugas aktifitas yang khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan.

Ketiga, hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna

menyelesaikan tugas-tugas organisasi.

Kempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.

Kelima impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi

Keenam, rasionalitas dan *predictability* dalam aktifitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu stabilitas organisasi. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkas yang logis dan bisa diprediksikan.

## **2. Teori Anggaran Tradisional**

penganggaran publik telah dipelajari dari tiga perspektif yang berbeda yaitu ekonomi, manajemen, dan ilmu politik (Caiden, 1990). Studi berakar pada ekonomi cenderung berfokus pada sifat barang publik dan terdistribusikan alokatif antara campuran barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. berbagai aturan dan proses alokasi diperiksa untuk *utilitas* relatif mereka dalam hal ini. upaya baru-baru ini telah berusaha untuk membangun model sektor publik pengambilan keputusan menggunakan konsep dari ekonomi mikro. Momok masyarakatadministrator sebagai *maximizer* anggaran diri tertarik adalah karakter sentral dalam skenario ini. Ekonomi menawarkan logika, keanggunan matematika, dan sederhana bentuk yang menghindari isu-isu mengenai nilai-nilai

politik, namun, ekonomi yang ditawarkan sangat sedikit bimbingan kepada *budgeteer* dari dunia praktis "(Caiden,1990: 233). Ilmuwan politik secara alami menyoroti dimensi politik dari sumber daya proses alokasi, dan peran anggaran dalam proses pembuatan kebijakan. Itu perspektif politik telah didominasi oleh teori *incrementalism*, yang dimulai sebagai sebuah teori deskriptif tetapi mencapai status normatif di beberapa kalangan.

Di ringkasan singkat, *incrementalism* menyatakan bahwa anggaran berubah hanya sedikit dari tahun ke tahun, dan besar realokasi dapat mahal dan harus dihindari di cahaya dari negara pengetahuan mengenai isu-isu kebijakan sektor publik; sumber daya proses alokasi adalah proses terfragmentasi, *bottom-up* yang ditandai dengan rasa hormat keahlian substantif dan alokasi sebelumnya. Teori ini berbasis organisasi *proach* untuk pengembangan teori anggaran berfokus pada bagaimana sifat organisasi publik mempengaruhi proses alokasi sumber daya dan bagaimana alam dari proses alokasi sumber daya mempengaruhi operasi-organisasi masyarakat.

## **B. KONSEP EVALUASI**

### **1. Defenisi Evaluasi**

Secara umum istilah evaluasi menurut Dunn dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam arti spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan ( dalam Suratman, 2017).

Menurut Suchman memandang evaluasi sebagai sebuah proses

menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan ( dalam Suharsimi Arikunto Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2004 ).

Menurut Worthen dan Sanders mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah di tentukan ( dalam Suharsimi Arikunto Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2004 ).

Menurut Stufflebeam mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (dalam Suharsimi Arikunto Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2004).

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi ditujukan untuk melihat sebgaiian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan serta dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dengan demikian evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan ( dalam Rahayu Kusuma Dewi 2016 ).

Menurut Madaus memaparkan evaluasi adalah studi yang dirancang dan dilaksanakan untuk menilai (*judge*) dan meningkatkan manfaat program yang dievaluasi ( dalam Rusydi Ananda dan Tien Rafida, 2017 ).

Menurut Mehren dan Lehmann menjelaskan evaluasi adalah suatu proses

merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Pengertian yang dikemukakan keduanya menunjukkan bahwa evaluasi itu merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data dan berdasarkan informasi atau data tersebut dibuat suatu keputusan (dalam Rusydi Ananda dan Tien Rafida, 2017).

Menurut Brinkerhoff dalam Muryadi (2017) evaluasi adalah penyelidikan (proses pengumpulan informasi) yang sistematis dari berbagai aspek pengembangan program profesional dan pelatihan untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatannya.

Evaluasi menurut Tayibnapi mengatakan bahwa evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai dalam Mesiono (2017).

## **2. Tujuan dan fungsi Evaluasi**

Menurut Subarsono menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yakni :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan

evaluasi mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

- d. Mengukur dampak dari suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah memberikan masukan bagi perumus kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Samodra Wibawa, dkk (dalam Nugroho D, 2006) bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan
- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku sesuai dengan standar dan prosedur yang

ditetapkan oleh kebijakan.

c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

d. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

### 3. Indikator Evaluasi

Indikator atau kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (2003) sebagai

berikut :

a. Efektivitas.

Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.

b. Efisiensi.

Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Kecukupan.

Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

d. Perataan.

Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada

kelompok-kelompok yang berbeda.

e. Responsivitas.

Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

f. Ketepatan.

Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

#### 4. Model-Model Evaluasi

Menurut Ernes R. House dalam (Nugroho) membuat taksonomi evaluasi cukup berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi:

- a. Model sistem, dengan indikator utama adalah efisien.
- b. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas.
- c. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektian dan keterjagaan kualitas.
- d. Model tujuan bebas, dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.
- e. Model kekritisian seni, dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.

f. Model review professional, dengan indikator utama adalah penerimaan professional.

g. Model krusial legal, dengan indikator utama adalah resolusi.

h. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Menurut Michael Scriven (dalam Wirawan, 2012) membedakan model evaluasi menjadi dua, yaitu:

a. **Evaluasi formatif** (*formative Evaluation*), yaitu evaluasi yang didesain dan dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang dikembangkan. Evaluasi formatif dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengukur hasil pelaksanaan program secara periodi.
- 2) Untuk mengukur apakah klien/partisipan bergerak kearah tujuan yang direncanakan.
- 3) Untuk mengukur apakah sumber-sumber telah dipergunakan sesuai denngan rencana.
- 4) Untuk menentukan koreksi apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan.
- 5) Memberikan balikan.

b. **Evaluasi sumatif**, dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program.

Evaluasi ini mengukur kinerja akhir objek evaluasi. Evaluasi sumatif berupaya untuk mengukur indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Hasil dan pengaruh layanan atau intervensi program.
- 2) Mengukur persepsi klien mengenai layanan dan intervensi program.
- 3) Menentukan *cost effectiveness*, *cost efficiency*, dan *benefit* program evaluasi sumatif dilakukan dengan tujuan.
- 4) Menentukan sukses keseluruhan pelaksanaan program.
- 5) Menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai.
- 6) Menentukan apakah klien mendapatkan manfaat dari program.
- 7) Menentukan komponen yang mana paling efektif dalam program.
- 8) Menentukan keluaran yang tidak diantisipasi dari program.
- 9) Menentukan cost dan benefit program
- 10) Mengomunikasikan temuan evaluasi kepada para pemangku kepentingan.
- 11) Mengambil keputusan apakah program harus dihentikan,

dikembangkan, dihentikan, atau dilaksanakan di tempat lain.

## C. KONSEP EVALUASI PROGRAM

### 1. Definisi Evaluasi Program

Program secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dengan proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada 3 unsur penting dalam sebuah program, yaitu:

- a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang (dalam Suharsimi Arikanto 2014).

Menurut Evert vendung (dalam Wirawan 2002) mengemukakan empat kriteria dalam evaluasi program sebagai berikut :

- a. Efektif, derajat pengaruh (*outcome*) pencapaian tujuan, mengabaikan biaya-biaya.
- b. Produktivitas, keluaran melalui biaya.
- c. Efisien (*cost-benefit*) nilai uang dari pengaruh program dengan

menghitung nilai uang biaya program.

- d. Efisiensi (*cost effectiveness*) pengaruh program dalam pengertian fisik melalui menghitung uang biaya program.

Evaluasi program adalah studi sistematis yang dilakukan untuk menilai seberapa baik program bekerja dan memberi hasil yang lebih efektif dan efisien. Melalui evaluasi program, dapat membuat keputusan manajemen yang lebih baik, mendukung pendekatan baru dan inovatif dan praktek yang muncul. Evaluasi program dapat menilai kinerja program pada semua tahap perkembangan program. Kolaborasi adalah kunci untuk evaluasi program yang sukses ( dalam Suratman, 2017 ).

Selanjutnya, Arikunto (2005), mengemukakan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Kemudian, Moekijat (1995) mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (value) atau untuk mengukur betapa baik penyelesaian yang sesungguhnya dari suatu program yang berlangsung (atau kurang sering, program yang sudah selesai) sesuai dengan penyelesaian yang diharapkan.

Dari berbagai definisi ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pemilihan pemecahan masalah yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

## 2. Langkah-langkah Evaluasi Program

Evaluasi program dilaksanakan melalui beberapa tahap. Garis besar tahapan evaluasi program meliputi tahap persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan evaluasi program, dan tahap monitoring pelaksanaan program (Arikunto 2004). Penjelasan tentang langkah-langkah tersebut dapat dilihat dibawah ini :

### a. Persiapan evaluasi program

Pada tahap persiapan evaluasi program ada langkah langkah yang harus ditempuh meliputi :

- 1) Penyusunan evaluasi, terkait dengan model seperti apa yang akan diterapkan dalam melakukan kegiatan evaluasi program.
- 2) Penyusunan instrument evaluasi, yang disusun bergantung pada metode pengumpulan data yang dipilih
- 3) Validasi instrument evaluasi, instrument yang telah tersusun tersebut masih perlu di validasi untuk mengetahui tingkat validitas dan realibilitasnya.
- 4) Menentukan jumlah sampel yang diperlukan.
- 5) Penyamaan persepsi antar evaluator tentang berbagai hal sebelum pengambilan data dimulai.

b. Pelaksanaan evaluasi program

Evaluasi program dapat dikategorikan menjadi empat jenis

sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Reflektif, digunakan untuk mengevaluasi kurikulum sebagai ide.
- 2) Evaluasi Rencana, digunakan pada saat rencana program sedang ditulis tentu saja dapat segera memberikan umpan balik kepada para para pengembang sehingga perbaikan akan segera dilakukan.
- 3) Evaluasi Proses, digunakan untuk membuat perhatian evaluator diarahkan tidak saja kepada apa yang terjadi dengan program sebagai kegiatan, tetapi evaluasi telah mencoba melihat mengenai berbagai faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program sebagai kegiatan.

Keempat jenis evaluasi tersebut mempengaruhi evaluator dalam menentukan metode dan alat pengumpul data yang digunakan. Dalam pengumpulan data dapat menggunakan berbagai alat pengumpul data yang meliputi pengambilan data dengan tes, pengambilan data dengan observasi, pengambilan data dengan angket, pengambilan data dengan wawancara, pengambilan data dengan metode analisis dokumen dan artifak, dan pengambilan data dengan teknik lainnya.

c. Tahap *Monitoring* (Pemantauan)

*Monitoring* (pemantauan) memiliki dua fungsi pokok, yaitu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana program dan untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Sasaran monitoring adalah menentukan hal-hal berikut :

- 1) Seberapa jauh pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana program.
- 2) Seberapa jauh pelaksanaan program telah menunjukkan tanda-tanda tercapainya tujuan program.
- 3) Apakah terjadi dampak tambahan atau lanjutan yang positif meskipun tidak direncanakan.
- 4) Apakah terjadi dampak sampingan yang negative, merugikan, atau kegiatan yang mengganggu.

Fungsi pokok pemantauan adalah mengumpulkan data tentang pelaksanaan program. Adapun teknik dan alat pemantauan terdiri dari teknik pengamatan partisipatif dengan menggunakan lembar pengamatan, catatan lapangan, dan alat perekam elektronik. Teknik berikut adalah teknik wawancara dan teknik pemanfaatan serta analisis data dokumentasi. Kemudian setelah menentukan teknik dan alat pemantauan maka tahap selanjutnya adalah

perencanaan pemantauan dan pemanfaatan hasil pemantauan. Pemaknaan hasil pemantauan ini menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya dalam pelaksanaan program.

### 3. Model-Model Evaluasi Program

#### a. Model Evaluasi Bebas Tujuan (*Goal-Free Evaluation Approach*)

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven (dalam Rusydi Ananda 2017) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kinerja suatu program, dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi, baik hal-hal yang bersifat positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang tidak diharapkan). Evaluasi model *goal free evaluation*, fokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, dan membandingkannya dengan sebelum program dilakukan. Evaluasi juga membandingkan antara hasil yang dicapai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut atau melakukan *cost benefit analysis*.

#### b. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif (*Formative-Summative Model*)

Scriven (dalam Rusydi Ananda 2017) membedakan model evaluasi menjadi dua, yaitu :

- 1) Evaluasi Formatif (*Formative Model*), didefinisikan sebagai

proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas produk atau program yang dirancang. Evaluasi formatif bertujuan menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk atau program tersebut lebih sistematis, efektif dan efisien. Evaluasi formatif dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk perbaikan program.

2) Evaluasi Sumatif (*Summative Model*), adalah proses menilai suatu objek, apabila ternyata produk atau program yang dirancang ternyata sama efektifnya dengan yang lama, maka produk atau program yang dirancang dapat digunakan atau dilanjutkan. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada pengguna/konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program.

c. Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam's (dalam Rusydi Ananda 2017), dimana model ini terdiri atas 4 jenis aspek yang dievaluasi yaitu :

1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan. Tujuan

evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sehingga evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan.

- 2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
- 3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses menunjuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, kapan kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.
- 4) Evaluasi Produk/Hasil (*Product Evaluation*), membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang telah dilakukan setelah program telah terlaksana. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini evaluator akan menentukan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/dimodifikasi atau bahkan dihentikan.

## **D. KONSEP EVALUASI KEBIJAKAN**

### **1. Definisi Evaluasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2012) evaluasi kebijakan publik dipandang sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Sedangkan, Nugroho (2009:) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai.

Menurut Anderson mengemukakan evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak merupakan langkah terakhir dalam suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang fungsional. Evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (dalam Winarno 2012).

Menurut Muhadjir mengemukakan evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan

hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan (dalam widodo 2008).

Menurut Lester dan Stewart Evaluasi kebijakan dapat di bedakan kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah di tetapkan sebelumnya (dalam Winarno 2008 ).

Menurut Jones Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan, menyangkut substansi, implementasi dan dampaknya dalam Rares Debby D. V. Kawengian Joyce Jacinta ( 2015 ).

## **2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan**

James Anderson membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, (dalam Winarno 2008) sebagai berikut :

### **a) Tipe pertama**

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b) Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program itu sendiri.

c) Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

### **3. Fungsi Evaluasi Kebijakan publik**

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003) evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

a. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

b. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

d. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat social ekonomi dari kebijakan tersebut.

## **E. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK**

### **1. Definisi Kebijakan Publik**

Definisi kebijakan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Menurut Carl Friedrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

dan Kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (dalam Suratman 2017).

Selanjutnya menurut Dunn (2000) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta Polis (Negara atau Kota) dan Pur (Kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi Politia (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah.

Menurut Richard Rose mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan ( dalam Rahayu Kusuma Dewi 2016 ).

Menurut Chandler dan Plano mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan (dalam Yulianto Kadji 2015).

Menurut Woll menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (dalam Taufikurokhman 2014).

Menurut Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah (dalam Taufikurokhman 2014).

Menurut Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (dalam Taufikurokhman 2014).

Kraf and Furlong menyatakan bahwa kebijakan publik adalah berkenaan dengan tujuan-tujuan dan sarana kebijakan yang disahkan secara formal, dan juga regulasi serta praktek-praktek dari egesi-egensi yang mengimplementasikan program (dalam Muh. Ikramullah Akmal 2016).

Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya” (dalam Jonathan Tribuwono 2017).

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

“keputusan tetap yang dicirikan /dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”. Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu
- c. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat

Salah satu fungsi utama ( *Core functions*) dari administrator publik adalah pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan ( Rosenbloom dan Kravchuk, 2005 ). sebagai penentu kebijakan mereka perlu memahami masalah dan kebutuhan publik, karena tujuan utama kebijakan publik adalah menyelesaikan masalah dan kebutuhan publik (Jones,2004).

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”.

## **2. Proses Pembuatan Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan

penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Tahap-Tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan ialah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

b. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

c. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya nancial dan manusia.

e. **Penilaian Kebijakan**

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

**3. Kerangka Kerja Kebijakan Publik**

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variable sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
- c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan.
- d. Kemampuan actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan sebagainya.

#### **4. Teknologi Pertanian**

Dalam Perkembangan kebudayaan manusia, dari masa prasejarah sampai era manusia modern, mengalami beberapa tahapan peradaban. Pada awal peradaban kuno, manusia berkelompok dan hidup dengan cara berpindah-pindah (nomaden) dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara mengumpulkan buah-buahan, biji-bijian, atau hasil pertanian lain yang dapat dimakan, atau menangkap hewan. Pada era kebudayaan berpindah dan berburu ini, kelompok atau suku manusia telah mengenal apa yang kita kenal sekarang sebagai teknologi cara membuat senjata dari batu, masa kebudayaan itu dikenal sebagai zaman batu kuno (paleolitikum).

Modernisasi pertanian merubah bentuk pertanian dari cara-cara tradisional menjadi cara-cara yang lebih modern. Perubahan-perubahan tersebut meliputi beberapa hal, antara lain dalam pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, penggunaan sarana-sarana produksi pertanian, dan pengaturan waktu panen. Dalam bidang pertanian, perubahan-perubahan sosial petani akibat dari modernisasi adalah dengan diperkenalkannya teknologi baru dalam bertani.

Soeprodjo (dalam waktu itu Sekretaris Konsorsium Ilmu Pertanian, Dikti, Depdikbud memberikan definisi dari pendekatan falsafah teknologi pertanian sebagai ilmu pengetahuan praktik-empirik yang bersifat pragmatik finalistik, dilandasi paham mekanistik-vitalistik dengan penekanan pada obyek formal rekayasa dalam pembuatan dan penerapan peralatan, bangunan lingkungan, sistem produksi serta pengolahan dan pengamanan hasil produksi. Teknologi

pertanian dikenalkan dengan menciptakan shadoof, jentera terbuat dari kayu untuk menaikkan air (Nasoetion, 2003).

## **5. Teknologi dalam Masyarakat**

Teknologi Modern adalah teknologi modern terhadap lingkungan, bukan berarti Indonesia harus kembali kepada teknologi tradisional atau teknologi asli perdesaan yang produktivitasnya rendah, karena penduduk Indonesia sudah meningkat 400% sejak tahun 1950-an. Teknologi modern mampu mengatasi kebutuhan pangan penduduk yang telah menjadi besar tersebut, tetapi dengan penggunaan teknologi modern, kita tidak boleh mengabaikan mutu lingkungan.

## **F. Dampak Positif dan Negatif Teknologi Pertanian**

### **1. Dampak Positif**

Pengolahan lahan yang luas membuat para petani memerlukan waktu yang lama tanpa adanya teknologi. Orang dapat menghabiskan waktu sehari dalam mengolah lahan pertanian seluas 3 hektar. Namun dengan adanya teknologi petani akan lebih mudah dan cepat dalam mengolah lahan mereka. Contohnya saja dengan menggunakan mesin traktor. Dulu belum ada mesin traktor yang ada, hanyalah mereka menggunakan bantuan hewan seperti kerbau dan sapi untuk menarik garu atau yang lebih sederhana lagi hanya menggunakan cangkul.

Itulah yang membuat mereka lama dalam mengolah lahan mereka. selain dari segi waktu yang pastinya lebih hemat penggunaan teknologi juga hasil yang diperoleh oleh petani lebih beragam produk dan lebih melimpah. Dulu petani biasa

menanam padi biasa, sekarang dengan cara mengawinkan tanaman padi dapat menghasilkan padi hibrida yang lebih banyak hasil dan lebih menarik bentuk fisik dari padi tersebut. Dan masih banyak lagi tentunya keuntungan-keuntungan dari penggunaan teknologi.

## **2. Dampak Negatif**

Ketika zaman dahulu nenek moyang kita menanam tanaman cabe maupun tomat dan sayuran lainnya dengan cara menyiramnya setiap hari dan memberi pupuk kompos, sekarang karena karena kondisi tanah tidak sama seperti dulu maka harus menyiramnya dengan pompa dan sekarang hama tanaman yang bermacam-macam maka di gunakanlah pestisida guna mengusir serta membunuh hama tanaman.

Penggunaan pestisida merupakan bukti kemajuan teknologi, tapi tahukah anda bahwa pestisida yang menempel di buah lalu dimakan pastinya akan sangat berbahaya bila dikonsumsi secara rutin. Selain itu penggunaan pestisida juga akan membuat hama yang belum jadi terbunuh menjadi lebih kuat. Dampak lain dari penggunaan teknologi ialah biaya yang relatif tinggi. Dengan biaya tinggi tentu nilai jual dari hasil panen akan tinggi dan hal ini tidak baik untuk para penduduk yang masih kurang mampu.

Apalagi bila hasil panen yang mahal adalah bahan kebutuhan pokok dari penduduk seperti padi dan cabe. Penduduk kurang mampu akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Mengenai dampak negatif dari peran teknologi masih banyak lagi. Kesimpulannya, dari peran teknologi dalam pertanian berkelanjutan

adalah dapat berdampak positif bila digunakan sesuai dengan aturan serta mempertimbangkan untuk kemaslahatan manusia namun sebaliknya bila hanya digunakan untuk mengeruk keuntungan maka akan berdampak buruk untuk kehidupan manusia, yaitu keserakahan yang tak mempertimbangkan nasib orang lain.

### **3. Program Bantuan Handtraktor**

Program Bantuan Handtraktor merupakan program prioritas Bupati Luwu Timur periode 2016-2020. Upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk peningkatan produksi padi, salah satunya adalah pengadaan alsintan (hand traktor) yang dimulai tahun 2016 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur sesuai yang tertuang pada Misi I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya. Adapun tujuan dari program bantuan handtraktor ini di harapkan dapat menjadi Percepatan proses pengolahan lahan, yang tentunya menysasar kelompok tani yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Program ini akan berkontribusi terhadap produktivitas padi di Kabupaten Luwu Timur. Program bantuan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur. Tingginya masyarakat dalam mengelola hasil pertanian tentunya membuat PR tersendiri untuk Dinas pertanian untuk membantu masyarakat dalam mengolah hasil pertaniannya menjadi semakin baik dan melimpah.

Fasilitas dalam pengolahan lahan yakni handtraktor yang berfungsi untuk mempercepat proses pengolahan lahan. pemerintah Kabupaten Luwu Timur membuat program yakni bantuan alat pertanian untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebagai cara untuk menjawab permasalahan petani yakni percepatan proses pengolahan lahan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur memberikan bantuan Alat Pertanian kepada kelompok tani dengan beberapa syarat:

1. Masyarakat di haruskan membuat kelompok tani.
2. kelompok tani harus terdaftar di simlu (Sistmem Informasi

Penyuluh Pertanian

3. memiliki akta notaris sebagai bukti bahwa kelompok tani berbadan hukum.
4. kelompok tani membuat proposal sebagai bahan permohonan bantuan alat pertanian

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan dengan mengadaptasi beberapa sumber literatur dengan pokok pembahasan yang sama yang telah diteliti sebelumnya, untuk digunakan sebagai bahan rujukan. Adapun Beberapa referensi penelitian sebelumnya yaitu :

1. Penelitian Skripsi Herman Susanto (2016) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, tentang “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)

di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan”. Hasil penelitiannya menunjukkan tahapan analisis Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdiri atas : 1) seleksi dan penetapan lokasi, 2) pertemuan awal dan validitas calon peserta PKH, 3) pencairan pertama, 4) pembentukan kelompok peserta PKH, 5) verifikasi komitmen, 6) penagguhan dan pembatalan, 7) pemuktahiran data dan 8) pengaduan. Variabel yang digunakan untuk menganalisis evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan Program PKH yaitu : 1) evaluasi konteks, 2) evaluasi masukan, 3) evaluasi proses dan 4) evaluasi hasil . Kendala-kendala yang dihadapi yaitu : 1) RTSM masih sangat bergantung dengan bantuan PKH, 2) pemuktahiran data harus lebih ditingkatkan dan 3) koordinasi anatar lembaga terkait harus senantiasa terjalin dan ditingkatkan.

2. Penelitian Skripsi Susnaini (2014) Universitas Jember, tentang “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013 di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”. Kriteria evaluasi penelitian ini terdiri atas beberapa variabel yaitu : 1) efektivitas, 2) kecukupan, 3) pemerataan, 4) Responsivitas, dan 5) Ketepatan. Permasalahan yang dihadapi yaitu : 1) tidak meratanya masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan PKH, 2) adanya peserta PKH yang mealnggar komitmen yang telah disepakati, 3) jumlah pendamping tidak sebanding dengan peserta PKH (pendamping harus ditambah jumlahnya).

Dari penelitian terdahulu di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan dari

rencana penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dari penelitian di atas yaitu sama-sama membahas mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **H. Kerangka Pikir**

Berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka di atas, maka dapat dikatakan bahwa Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada proses “Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur”. Jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam (1967) dengan enam (4) variabel yang terdapat pada teorinya, yakni:

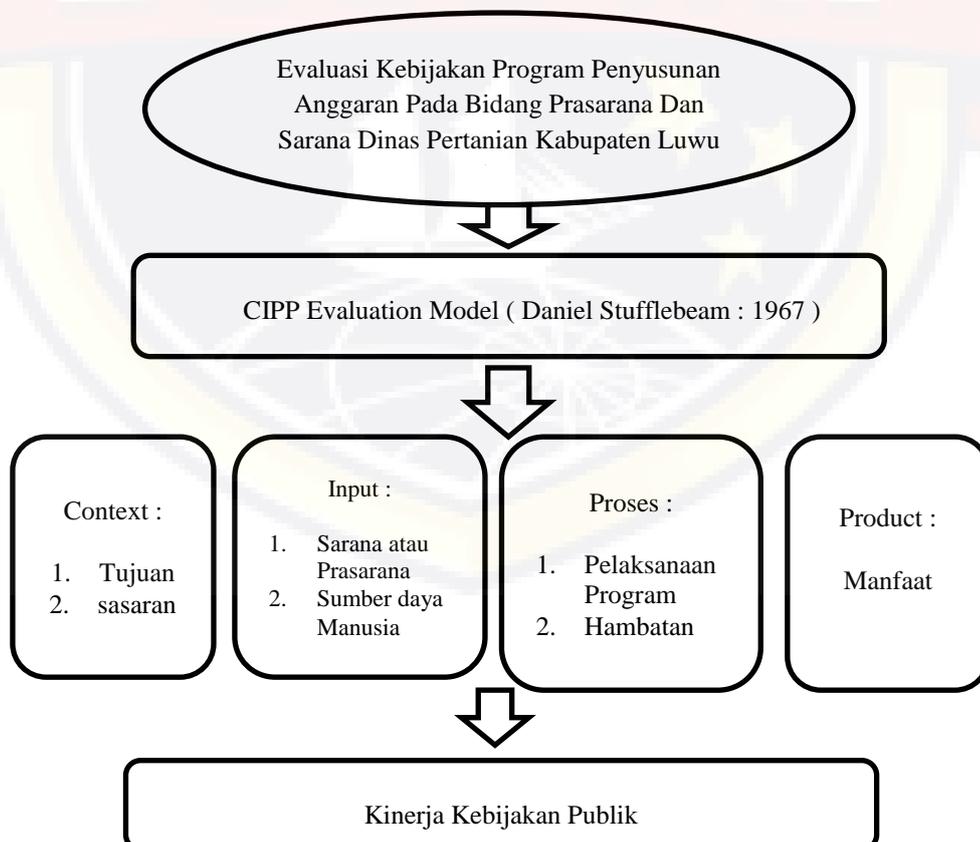
1. Evaluasi Kinerja konteks ( *Context* ) Berkaitan dengan mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program atau yang mengidentifikasi latar belakang munculnya suatu program.
2. Evaluasi Kinerja masukan ( *input* ) mengarah kepada keputusan-keputusan strategi dan desain. Evaluasi ini mengidentifikasi problem, asset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas dan membantuk kelompok-kelompok untuk menilai tujuan-tujuan, prioritas, dan manfaat dari suatu program, menilai pendekatan alternative, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan

yang ditargetkan.

3. Evaluasi Kinerja proses ( Process ) mengidentifikasi kekurangan-kekurangan program dan memperbaiki implementasinya.
4. Evaluasi Kinerja Produk ( *product* ) berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat atau hasil yang telah dicapai suatu program.

Peneliti menganggap teori yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam lebih relevan digunakan untuk masalah “Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

**Gambar II Kerangka Pikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018 : 8-9) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalis karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument peneliti harus berinteraksi dengan sumber data dan harus mengenal betul orang yang memberikan data tersebut. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang sebenarnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya. Jadi riset kualitatif adalah berbasis pada konsep “going exploring” yang melibatkan in-depth and case-oriented study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal . Finlay (dalam Chariri. A: 2009).

Penelitian kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi

antara peneliti data dengan sumber data. Dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan dan persepsi berbeda-beda, sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing.(Sugiyono, 2018).

Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Sehingga metode penelitian ini memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan judul penelitian yang diangkat maka penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

## **C. Gambar Defenisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkungan objek penelitian/objek yang diteliti. Dalam definisi operasional akan

menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Seperti dapat digambarkan pada tabel berikut :

**2.1 Tabel Definisi Operasional Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur	Context	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Tujuan Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur</li> <li>2. Siapakah yang menjadi sasaran kebijakan program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur</li> </ol>
Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan	Input	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran prasaran apa saja yang disediakan oleh Dinas Pertanian Dalam Menunjang Keberhasilan Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan</li> </ol>

<p>Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur</p>		<p>Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.</p> <p>2. Siapa saja sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur</p>
<p>Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur</p>	<p>Proses</p>	<p>1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur</p> <p>2. Hambatan apa saja dalam Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur</p>
<p>Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana</p>	<p>Product</p>	<p>1. Apakah Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur</p>

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur		bermanfaat bagi masyarakat
--	--	----------------------------

#### **D. Narasumber dan Informan**

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah subjek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang menjadi tujuan penelitian, sesuai permasalahan penelitian ini maka informan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
2. Perwakilan Anggota DPRD Dapil 1
3. Kasubag Perencana/Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
4. Camat pada Dapil 1
5. Perwakilan Kelompok Tani pada Dapil 1

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Secara umum jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas ;

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti, berasal dari sumber-sumber tidak tertulis berupa informasi atau data lapangan yang berkenaan dengan masalah penelitian yang umumnya ditemukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informasi.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berkenaan dengan dokumen, peraturan dan perundang-undangan atau data lain yang sifatnya tertulis dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Studi ini menggunakan teknik pengumpulan data dari tiga sumber yaitu:

1. Arsip dan dokumen program/kegiatan
2. *Interview* dengan informasi terpilih yang sudah barang tentu mengetahui permasalahan yang di teliti, dan
3. observasi langsung kepada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan dan beberapa kelompok tani di Kabupaten Luwu Timur

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data tersedia yang diperoleh dari lapangan, penulis pertama-tama

membuat rangkuman data, memberikan kode-kode tertentu, merumuskan menjadi tema-tema tertentu yang bermakna, mengelompokkan ke dalam kelas-kelas konstruk yang sesuai dan menyajikannya dalam suatu narasi atau bentuk penyajian kualitatif lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut penulis lakukan sedini mungkin, setiap saat setelah ada data yang diperoleh.

Kesimpulan penelitian akan mengalir mulai dari kesimpulan awal yang belum jelas dan relatif longgar, kemudian bergerak menjadi lebih mengakar dengan kokoh setelah melalui proses verifikasi, yang secara berulang-ulang diuji kebenaran dan kekokohan serta kecocokan selama penelitian berlangsung.

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Dalam reduksi data penelitian menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan oleh peneliti.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan

mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut. Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. *Concluding Drawing/verification* (menarik kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti sesama peneliti berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN**

##### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2008, dengan Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

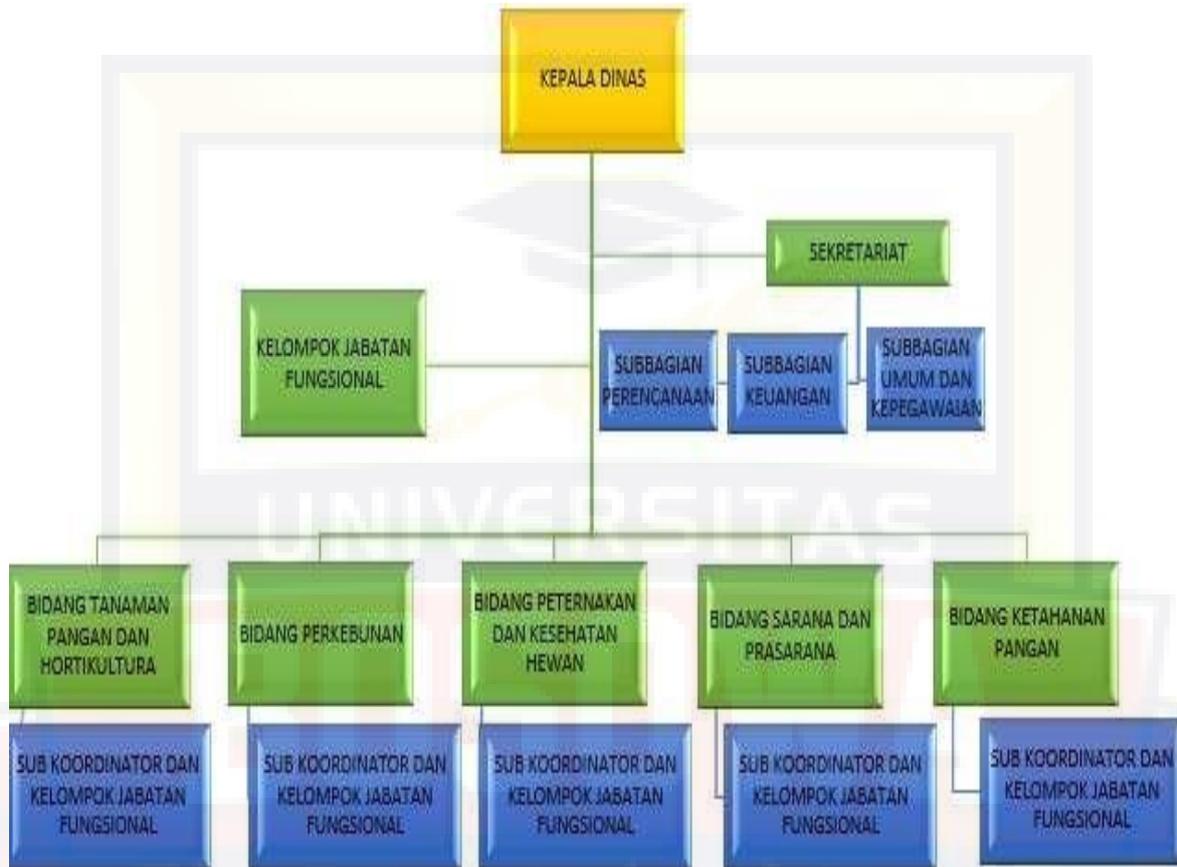
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai Tugas Pokok dan Rincian Tugas Struktural yang diatur melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 87 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, pada pasal, 3 yang dimana Susunan Organisasi Dinasterdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Subbagian Perencanaan;
  - 2) Subbagian Keuangan; dan
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Perkebunan, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang prasarana dan sarana pertanian, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang ketahanan pangan, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok jabatan Fungsional.

## 2. STRUKTUR ORGANISASI



## 3. TUPOKSI

### a. Kepala Dinas

Kepala, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- 4) Menyusun rancangan, megoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- 6) Mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah
- 7) Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, prasarana dan sarana pertanian, dan ketahanan pangan
- 8) Menyusun kebijakan, merencanakan, megorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta Menyusun rencana strategis dinas sesuai dengan visi dan misi daerah
- 9) Merumuskan program kerja sesuai rencana strategis dinas
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas
- 11) Membina sekretaris dan para kepala bidang dalam

melaksanakantugasnya

- 12) Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agarsenantiasa berjalan optimal
- 13) Meyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkup dinas
- 14) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum dibidang tanamana pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, prasarana dan sarana pertanian, ketahanan panganberdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah
- 15) Menyelenggarakan dan meberikan dukungan fasilitas pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitanizin bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, prasarana dan sarana pertanian, ketahanan pangan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah
- 16) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, prasarana dan sarana pertanian, ketahanan pangan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah
- 17) Menyelenggarakan pengelolaan unit pelaksanaan teknis

daerah

- 18) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi
- 19) Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 20) Menyusun laporan hasil pemeriksaan yugas kepala atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- 21) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 7) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- 8) melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- 9) melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- 10) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- 11) melaksanakan dan megoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan

penyajian data dan informasi

- 13) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan
- 14) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- 15) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 16) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- 17) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- 18) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- 19) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik Daerah
- 20) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 21) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 22) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran

Dinas;

- 7) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
- 8) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
- 9) menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- 10) menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- 11) melakukan penyusunan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas
- 12) mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian databerbasis teknologi informasi
- 13) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 14) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

16) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Subbagian Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan

pembayaran;

- 7) meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- 8) mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
- 9) mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- 10) melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan sertaverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- 11) melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- 12) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 13) menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- 14) mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- 15) mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- 16) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi
- 17) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan
- 18) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

19) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan.

Uraian tugas Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut

- 1) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah tugas
- 5) Mengikuti rapat tugas sesuai dengan bidang tugasnya
- 6) Melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat dinas

- 7) Melakukan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan
- 8) Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan
- 9) Mengelola prasarana dan sarana pertanian serta melakukan urusan rumah tangga
- 10) Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor
- 11) Menyiapkan bahan dan Menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta Menyusun laporan barang inventaris
- 12) Menyiapkan bahan dan meyusun rencana administrasi pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang
- 13) Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai
- 14) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai
- 15) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana
- 16) Menyiapkan bahan dan Menyusun rencana formasi, informasi, jabatan, dan besetting pegawai

- 17) Menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya
- 18) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara
- 19) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 20) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 21) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 22) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang

perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Bidang tanaman pangan dan Hortikultura :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- 7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan

- penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 8) melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - 9) melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - 10) melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - 11) melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - 12) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha pertanian;
  - 13) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - 14) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - 15) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 16) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dalam lingkungan Bidang Perkebunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebidanan bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- 8) melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- 9) melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- 10) melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- 11) melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- 12) melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

- 13) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha perkebunan;
- 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perkebunan;
- 15) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 16) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perkebunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 18) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner,

pengolahan dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- 7) melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- 8) melaksanakan pengendalian peredaran dan penyediaan benih Bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- 9) melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi ternak;

- 10) melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- 11) melaksanakan pengawasan obat hewan;
- 12) melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- 13) melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- 14) melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
- 15) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- 16) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- 17) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- 18) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- 19) melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 20) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 21) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 22) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun kebijakan, merencanakan mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi;
- 7) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi;
- 8) Melaksankan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- 9) Melaksanakan pengembangan potensi dan pengolahan lahan dandan irigasi pertanian;
- 10) Melaksanakan penyediaan, pengawasan danbimbinganpenggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

- 11) Melaksanakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- 12) Melaksanakan fasilitas investasi pertanian;
- 13) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 14) Menilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

j. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan Program dan Kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketahanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- 7) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- 8) melaksanakan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- 9) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan,

konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan:

- 10) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan.
- 11) melaksanakan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan;
- 12) melaksanakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten;
- 13) melaksanakan penyediaan data informasi pasokan dan harapangan serta pengembangan jaringan pasar;
- 14) melaksanakan koordinasi pemerintah dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 15) menilai kinerja pegawai Aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 16) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hetahanan Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada an sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Luwu Timur dalam arah pembangunan bidang pertanian saat ini terus melakukan sebuah terobosan untuk menunjang program dibidang pertanian untuk mencapai hasil pertanian daerah yang maju dan lebih baik. Adanya visi pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 dengan penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih. Visi Luwu Timur yaitu “ **Luwu Timur Yang Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**” yang ditunjang oleh misi **Kabupaten Luwu Timur 2021-2024** yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaring luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

**Berlandaskan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian telah di cantumkan dalam Dokumen RPJMD.** Meningkatkan Kabupaten Luwu Timur memiliki Visi maju melalui pembangunan berkelanjutan dengan

berdasarkan nilai agama dan budaya seharusnya dapat dijalankan oleh dinas terkait. Maka dari itu, hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran pada Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur akan di jelaskan sebagai berikut.

#### 1. Context dalam Kebijakan Program

Context berkaitan dengan mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program atau yang mengidentifikasi latar belakang munculnya suatu program. Context dalam Mengevaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran pada Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur berkaitan dengan mengidentifikasi tujuan pelaksanaan program dan sasaran pelaksanaan program.

##### a. Tujuan Program

Upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk mempermudah apa yang menjadi harapan yang tertuang pada Misi dan Visi Kepala Daerah terpilih agar dapat terealisasi, salah satunya adalah program-program pembangunan dan bantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan program prioritas Bupati Luwu Timur.

Berkaitan dengan Tujuan tersebut kepala Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang berinisial "A" mengatakan bahwa :

"Tujuan yang mendasari pelaksanaan program pada bidang

prasarana dan sarana pertanian di Kabupaten Luwu Timur karena permasalahan yang di hadapi petani Luwu Timur yakni keterlambatan dalam pengolahan lahan pertaniannya dan sulitnya akses yang dihadapi petani sehingga kami membuat program yang mendukung visi dan misi bupati terpilih yaitu dengan membentuk dan meningkatkan Jalan Produksi (JAPRO), Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi (JIDES). Hal itu didasari dengan keluhan masyarakat atas sulitnya akses yang dilalui masyarakat menuju ladang, yang dimana jika akses sulit untuk dilalui masyarakat mengeluarkan biaya yang cukup tinggi hal itu dilihat dari cepat rusaknya kendaraan masyarakat ketika mengangkut hasil pertanian mereka. Selain fokus pada jalan pertanian, Dinas pertanian juga membuat program pengadaan alsintan, yang terdiri dari prasarana dan sarana pertanian pertanian yang dimana program tersebut lebih memfokuskan kepada pengolahan lahan pertanian masyarakat yang dimana jika mendapatkan bantuan pengolahan lahan akan menurunkan dan mengifisiekan waktu proses pengolahan lahan pertanian masyarakat. (Wawancara, 20 Mei 2022)

Program-program bantuan yang tertuang pada bidang prasarana dan sarana pertanian sangatlah tepat dalam mendukung pembangunan pada sektor pertanian untuk mensejahterakan petani, program tersebut diantaranya adalah Pembangunan jalan pertanian

dan prasarana dan sarana pertanian kebutuhan pengolahan lahan pertanian masyarakat.

Penyusunan program merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh pejabat teknis dilapangan dimana hal tersebut bersumber dari ajuan permohonan yang dilakukan oleh petani kepada Kabupaten terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Petani. Tentunya dengan lahirnya program-program dari Dinas pertanian akan membatu masyarakat, hal itu juga dijelaskan oleh salah satu anggota Dewan Kabupaten Luwu Timur.

Berikut hasil Wawancanya :

b. Sasaran Kebijakan Program

Menurut hasil wawancara dengan salah satu Anggota Dewan Dapil 1 Kabupaten Luwu Timur berinisial “H” menyatakan bahwa:

Menurut salah satu perwakilan Anggota Dewan Dapil 1 Kabupaten Luwu Timur berinisial “H” mengatakan bahwa yang berhak menerima bantuan program bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Kabupaten Luwu Timur adalah tentunya semua masyarakat yang berada di kabupaten Luwu Timur, namun tentunya semua belum tentu terakomodir secara bersamaan berdasarkan kemampuan kekuatan anggaran yang berada dikabupaten Luwu Timur. Dan Tetap mengacu pada kekuatan anggaran pada Kabupaten Luwu Timur Pemerintah lebih selektif kembali dalam memberikan bantuan kepada kelompok tani dengan

menggunakan sistem melihat kebutuhan urgent/mendesaknya usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sekali lagi semua tergantung dengan kekuatan anggaran Daerah. (Wawancara, 18 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua narasumber di atas menunjukkan bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam percepatan proses pembangunan pada sektor pertanian, Luwu Timur dalam hal ini sebagai salah satu daerah yang menjalankan Program ini yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang telah berjalan sejak tahun yang di berdasarkan dokumen-dokumen yang dipedomani oleh Kabupaten Luwu Timur dan tentunya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh dinas pertanian yang tertuang pada program dan mengacu kekuatan anggaran yang terletak pada bidang sarana dan prasana.

Upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang di hadapi petani yakni keterlambatan dalam proses Pengolahan Lahan dan sulitnya akses yang dihadapi masyarakat untuk mengangkut hasil produksi pertanian melalui kebijakan dan alokasi program pada bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian agar percepatan proses pengolahan lahan bisa di laksanakan secara serentak.

## 2. Input dalam Kebijakan Program

Input mengarah kepada keputusan-keputusan strategi dan desain

dalam mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia, dan biaya untuk melaksanakan suatu program. Input dalam Program Bantuan yang terletak pada bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Timur.

a. Sarana atau Prasarana Kebijakan Program

Sarana atau prasarana merupakan fasilitas yang diberikan dalam menunjang keberhasilan program-program yang tertuang pada dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang didistribusikan ke kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur. Pemberian Sarana/Prasarana tersebut berupa Jalan Tani, Jalan Produksi Tani, Pupuk Subsidi, dan Alsintan.

Seperti yang di kemukakan oleh Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintanyang berinisial "A" mengatakan bahwa :

“Tentunya kita harus ketahui bersama terlebih dahulu makna dari sebuah program yang akan direncanakan, dengan pemahaman dan kematangan konsep yang dimana telah dilakukan tahapan verifikasi dan investigasi terhadap permohonan yang diajukan oleh kelompok tani. Jika di fokuskan pada pertanyaan banyak yang bisa dilakukan oleh Dinas pertanian dan ketahanan pangan di antaranya adalah,

pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan

produksi

➤ pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani

➤ pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian

➤ pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit

namun tentunya semua usulan tersebut adalah bersifat sementara tergantung hasil investigasi yang dilakukan oleh pejabat teknis di lapangan.”

Sarana/prasarana dalam Program yang tertuang pada dokumen perencanaan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur berupa pemberian bantuan yang dapat menunjang keberhasilan dari percepatan proses pengolahan lahan agar hasil Pertanian di Kabupaten Luwu Timur bisa meningkat.

Hal ini juga di perjelas oleh salah satu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani yang berinisial “I dan H” menyatakan bahwa :

“Bahwa hadirnya kebijakan yang di tetapkan oleh dinas Pertanian merupakan salah satu faktor yang membuat hasil pertanian masyarakat dapat meningkat, hal itu bisa dibuktikan dengan minimnya pengeluaran-pengeluaran yang harusnya di keluarkan oleh petani kini dapat dijadikan sebagai tabungan oleh

petani. Pengeluaran-pengeluaran yang di maksud adalah sewa alsintan, lancarnya akses sehingga kendaraan petani tidak mudah rusak, pengaliran air yang sudah stabil sehingga petani tidak perlu menyewa mesin Pompa air untuk memenuhi kebutuhan air di ladang pertaniannya dan sebagainya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusunan anggaran pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah sangat baik dari capaian-capaian yang dihasilkan oleh tahun-tahun sebelumnya, namun tentunya kebijakan tersebut harus selalu konsisten dengan cara tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan usulan-usulan yang dibutuhkan oleh petani, agar menu usulan yang tertuang pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat di pilih oleh petani sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

**b. Sumber Daya Manusia Kebijakan Program**

Sumber daya manusia merupakan ujung tombak pada setiap pelaksanaan suatu program. Sumber daya manusia dalam kebijakan alokasi program pada Dinas Pertanian Khususnya di Bidang Sarana dan Prasana.

Sebagaimana yang dilontarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur berinisial “A” menyatakan bahwa :

“Terkait sumber daya manusia yang terlibat dalam proses alokasi program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian pastilah melibatkan unsur Pemerintah, unsur masyarakat unsur swasta. Ketika berbicara soal Pemerintah tentunya tidak lepas dari Bupati Luwu Timur, kepala dinas pertanian beserta jajarannya, camat, kepala desa beserta jajarannya, berbicara unsur masyarakat yakni kelompok tani yang ada di kecamatan Angkona. Selain itu unsur swasta juga terlibat seperti pihak perusahaan yang memberikan bantuan pengolahan tanah.”(Hasil wawancara 04 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksanaan alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melibatkan beberapa sumber daya manusia di antaranya yaitu unsur pemerintah seperti Bupati, kepala dinas pertanian dan jajarannya, camat, kepala desa dan jajarannya, tentunya kelompok tani sebagai unsur masyarakat juga mengambil peran dalam terlaksananya alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, selain itu unsur swasta juga berpartisipasi dalam proses pelaksanaan alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam penyediaan unit

pembajakan sawah yang akan disalurkan ke kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima bantuan pembajakan sawah.

Hal senada juga di sampaikan oleh Salah satu Anggota DPRD Dapil 1 yang berinisial "H" mengatakan bahwa :

“Tentunya yang terlibat dalam penentuan kebijakannya adalah pemerintah daerah di antaranya Adalah Bupati, Kadis, Camat, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kemampuan dan kondisi keuangan Daerah. Selain, Pemerintah tentunya DPRD memiliki peran juga dalam menentukan Alokasi Kebijakan Program yang dimana tugas dari DPRD adalah menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik secara formal dan Non formal dengan masyarakat. Hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di lapangan terkhusus adalah sektor pertanian Luwu Timur harus dapat di tingkatkan, yang dimana dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Luwu Timur berprofesi sebagai petani, Persentasenya mencapai 43 Persen (66 Ribu jiwa) selain itu juga Kabupaten Luwu Timur memiliki lahan yang cukup luas untuk sektor pertanian terkhususnya tanaman padi. ” (Hasil wawancara 04 Maret 2020)

Selain itu, sumber daya manusia yang berperan penting dalam alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur adalah Bupati Luwu Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya, dalam hal ini Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, Kepala Bidang Saran dan Prasaran dapat turut andil dalam menentukan Program-program yang tepat yang dilkauan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur. Unsur masyarakat yakni kelompok tani tentunya juga berpartisipasi dalam pelaksanaan alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi program prioritas Bupati Luwu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sumberdaya yang terlibat dalam alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur ini berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat mulai dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur swasta berjalan sesuai yang di harapkan dan tetap melakukan koordinasi sesama unsur-unsur yang memiliki kepentingan.

### 3. Proses dalam Kebijakan Program

Proses dalam hal ini mengidentifikasi kekurangan-kekurangan pelaksanaan program dan memperbaiki implementasinya.

#### a. Pelaksanaan Kebijakan Program Penyusunan Anggaran

Salah satu hal terpenting dalam pertanian adalah menyediakan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program-program yang dimaksud adalah segala jenis permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan kemudian didiskusikan oleh internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan kemudian di bahas di asistensi Rencana Kerja (RENJA) di Bapelitbangda dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hal ini juga di perjelas oleh Camat Malili yang berinisial "N" mengatakan bahwa :

“Jadi selama ini apa yang menjadi program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur yang telah di laksanakan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Malili, yang dimana ada beberapa program yang sangat dirasakan oleh masyarakat salah satunya adalah pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani yang dimana masyarakat sudah dapat tersenyum dikarenakan dengan sebelum adanya program pemerintah tersebut, masyarakat lebih dalam merogoh koeknya yang dimana medan yang sulit untuk di akses, baik

roda 4 maupun roda 2. Aksesnya sangat sulit di karenakan sempit dan berlumpur di saat penghujan datang, sehingga masyarakat untuk berinisiatif mencari jalan alternatif walaupun medan yang di tempuh sangatlah jauh dan belum sepenuhnya layak untuk dilalui namun setidaknya dapat di akses oleh masyarakat. Namun setelah program masuk di Kecamatan Malili masyarakat sangat antusias dalam mengelola ladang pertaniannya, di karenakan hasil yang diperoleh dari ladang pertanian memiliki seleisih yang lebih yang dijadikan tabungan oleh masyarakat atau yang memiliki usaha dapat meningkatkan modal usahanya agar lebih besar. Intinya adalah masyarakat sangat merasa terbantu dengan program-program yang hadir di Kecamatan Malili.”

Jadi masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan melalui kelompok tani, yang dimana pelaksanaan perencanaan terdapat 3 pintu, diantaranya adalah melalui pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Kecamatan, Pokok- Pokok Pikiran (POKIR) DPRD dan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Pemerintah Daerah.

Jadi dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dapat meringankan masyarakat khususnya adalah masyarakat yang

memiliki profesi petani. Dimana awalnya masyarakat sangat mengeluhkan dengan akses medan yang harus di lalui untuk ke ladangnya kini dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur masyarakat merasa terbantu.

b. Hambatan Atau Kendala dalam Menentukan Kebijakan Program

Pada indikator ini, yang menjadi kendala awal dalam alokasi kebijakan program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur adalah kekuatan anggaran dan pejabat teknis.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melakukan kerja sama dengan kementerian pertanian dalam melakukan pengadaan handtraktor, dengan adanya kerjasama ini maka bantuan handtraktor lebih cepat terealisasi sehingga dapat meminimalisir hambatan yang terjadi.

Seperti yang di kemukakan oleh Kasubag Perencana yang berinisial "I" mengatakan bahwa :

“Hambatan yang terjadi selama proses alokasi program penyusunan anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur adalah adanya perubahan permendagri 13 tahun 2006 ke permendagri 90 revisi 50 tahun 2020 sehingga berpengaruh pada nomenklatur program,kegiatan dan sub kegiatan sehingga berpengaruh pada

target2 capain,indikator. Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh bidang prasarana dan sarana pertanian untuk mewujudkan program-program usulan yang di terima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan adalah Pagu SKPD yg diberikan terus mengalami penurunan setiap tahun dg tdk memperhatikan KP1 Bupati.” (wawancara, 04 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa hambatan atau kendala pelaksanaan program alokasi program penyusunan anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tentu perlu jadi perhatian khusus oleh pelaksana program maupun dari penerima bantuan tersebut karena sedikitnya jumlah pagu anggaran yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sehingga masyarakat yang mengusulkan bantuan untuk lebih sabar dan dapat memaklumi keadaan dan untuk Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan untuk lebih selektif memilih kelompok tani yang akan di bantu dengan melihat seberapa besar permasalahan di lapangan.

#### 4. Produk dalam Kebijakan Program

Produk dalam hal ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat atau hasil yang telah di capai suatu program. Pada indikator ini, manfaat yang diperoleh dengan adanya alokasi program penyusunan anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas

Pertanian Kabupaten Luwu Timur tentunya dapat meningkatkan mutu pengolahan lahan terkait dengan peningkatan produktivitas padi.

Sebagai mana yang di ungkapkan oleh salah satu kelompok tani di Kecamatan Tomoni Timur berinisial “Y” menyatakan bahwa :

“Dengan adanya program yang terlaksana di kelompok tani tentunya memiliki pengaruh besar, dimana akses yang di gunakan lebih mudah dan jika untuk di akses mengangkut hasil produksi ladang tidak mengalami kesulitan, selain adanya pembentukan jalan bantuan alsintan dapat memudahkan masyarakat (petani) untuk mengelola ladang pertaniannya, anggaran yang sebelumnya di gunakan untuk menyewa/perbaiki kendaraan kini bisa di gunakan untuk kebutuhan lainnya. Tentunya jika pemerintah selalu terlibat dalam proses peningkatan hasil produksi sektor pertanian bisa dipastikan petani akan selalu merasa terbantu dan meningkatkan pendapatan rumah tangganya.” (Wawancara, 04 Maret 2021)

Manfaat program-program di Kabupaten Luwu Timur yaitu mampu mempercepat proses pengolahan lahan sehingga petani di Kabupaten Luwu Timur menanam padi secara serentak dan panen secara serentak. Selain itu manfaat lain yang di rasakan adalah membantu masyarakat menepati jadwal yang telah disepakati melalui tudang sipulung yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pertanian dan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sawah sehingga bisa di pastikan waktu panen yang serentak.

Jadi dapat di simpulkan bahwa manfaat dari program-program ini sangat membantu masyarakat dalam alokasi program penyusunan anggaran bidang prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum mengenai Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan jika dilihat dari 4 variabel yang terdiri 8 indikator dalam model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Proses dan Product*) yaitu dari segi tujuan sudah berhasil mempercepat proses pembangunan yang ada pada Luwu Timur, Khususnya pada sektor pertanian yang dimana apa yang menjadi permasalahan pada proses peningkatan produksi sektor pertanian sudah berlahan teratasi dengan adanya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, di antaranya adalah dari program jalan sampai dengan alsintan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Tentunya proses yang menjadi acuan pelaksanaan program adalah dari aspirasi masyarakat yang dimana dapat digunakan masyarakat untuk mengajukan permohonan bantuan yaitu diantaranya adalah melalui, Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian.

Program-program yang diselenggarakan oleh bidang prasarana dan sarana pertanian garis besarnya sudah membuat dampak yang signifikan, hanya saja ada

beberapa yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan program yang diusulkan oleh masyarakat di antaranya adalah kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodir semua usulan, keterbatasan Sumber Daya Manusia yang masih sangat kurang dalam melaksanakan semua program yang di usulkan oleh masyarakat dan yang terakhir adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa segala usulan yang di perhadapkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan seleksi dengan tahapan usulan yang prioritas/urgent yang dapat diakomodir.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis terkait dengan Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang dapat dijadikan pertimbangan proses penentuan kebijakan program pembangunan di Luwu Timur.

1. Untuk melaksanakan program-program pada bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Pertanian membutuhkan banyak kebijakan, sebaiknya sebelum penyusunan dokumen perencanaan agar di bicarakan terlebih dahulu kepada pimpinan agar tidak ada perubahan dalam pelaksanaan program
2. Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, Kasubag program/perencana menjabarkan kepada pimpinan usulan apa-apa saja yang yang diterima

oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar mendapatkan solusi untuk merealisasikan usulan yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta di karenakan kekuatan Anggaran Kabupaten masih sangat minim untuk mengakomodir semua usulan yang diterima Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setiap tahunnya.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi. 2018. *Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan Publik, Tantangan Dan Strategi Dalam Penentuan Dan Implementasi Kebijakan*. Makassar: Kedai Buku Jenny.
- Arikunto, Suharsimi & Cipi Safruddin Abdul Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. PT.Hanindita Offset. Yogyakarta.
- Dunn, N.William . 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali Press. Jakarta.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Public Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kusuma, R. Dewi. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Nugroho D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Pradnyana, I Nyoman U.,Suardi I Dewa P O., Djelantik ,A W S.2017. *Realisasi Bantuan Alat Mesin Pertanian Kepada Subak (Kasus Pelaksanaan Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung dan Kedelai di Subak Penginyahan Desa Puhu Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar)*. E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata,6(4).
- Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suratman. H 2017. *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Capiya Publishing.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad Bandung.

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Sebagai Penyelenggara Negara*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Moestopo Beragama

Widodo, Joko. (2008) *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Bayumedia.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Wirawan. 2012. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta : Rajawali Pers.

## **JURNAL**

Mesiono,. 2017. “ *Educators Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan*”. Pusat Studi Pendidikan Rakyat. Medan, Volume 4 no. 2. Juli-Desember tahun 2017. 3-4

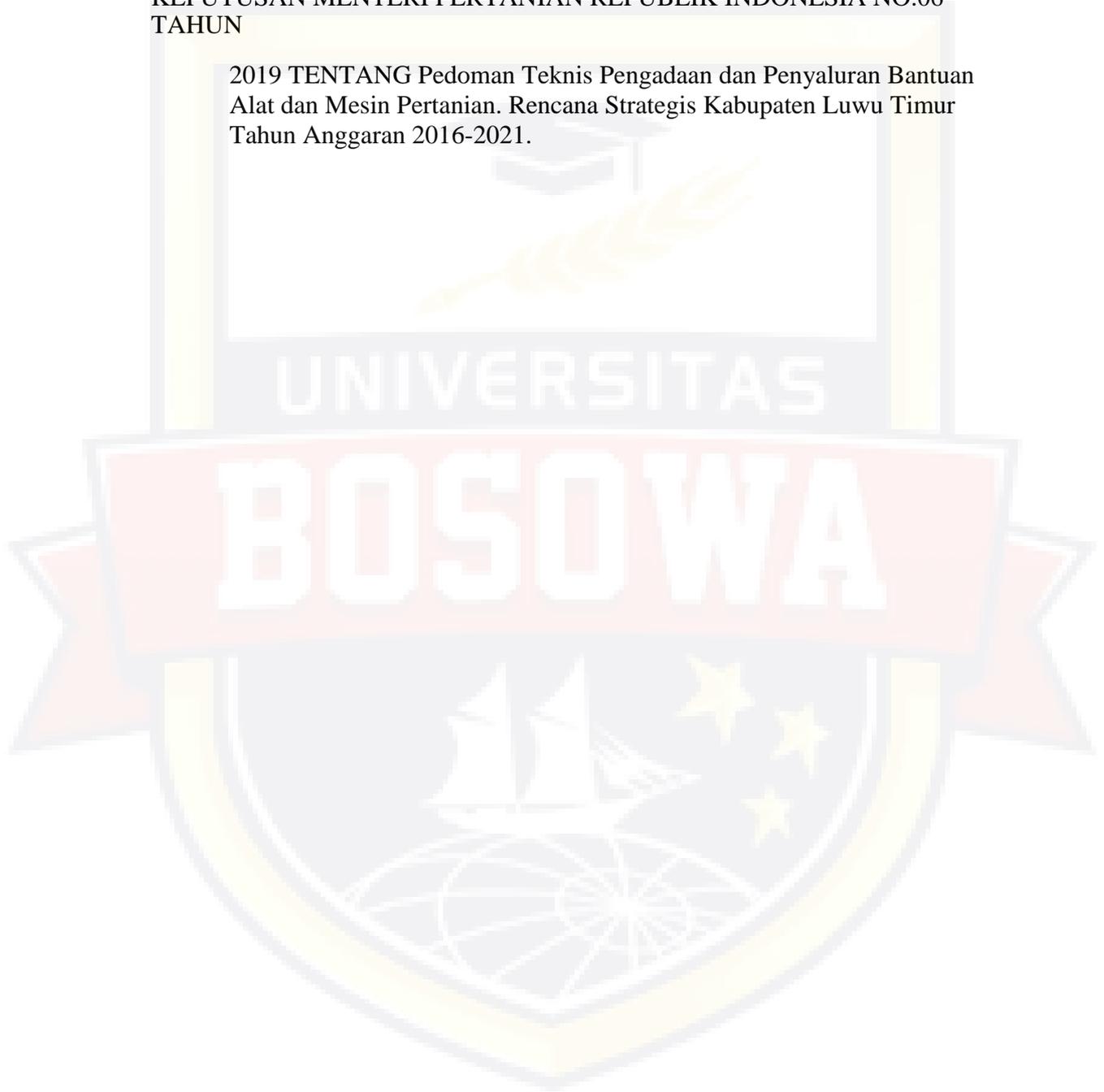
Muryadi, Agustanico. Dwi., 2017. “Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi”. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Vol.3 No.1, Januari 2017. 2-3.

Rares, Debby D. V. Kawengian. Joyce. Jacinta,. 2015. “*Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*”. E-journal acta diurnal volume IV. No 5. Tahun. 2015. 9-10.

## **Peraturaturan perundang-undangan**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NO.06  
TAHUN

2019 TENTANG Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan  
Alat dan Mesin Pertanian. Rencana Strategis Kabupaten Luwu Timur  
Tahun Anggaran 2016-2021.





# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI

Bersama Kasubag Perencanaan beserta staf Perencana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur



Bersama Camat Malili



Bersama Ketua Kelompok Tani Tunas Muda



## CURICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

Nama : Rakhsan R  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Tempat Tanggal Lahir : Lampia, 07 Agustus 1980  
Agama : Islam  
No.Hp. : +62 852-5644-6166  
Alamat. : Jl.pangeran Diponegoro  
Email. : rakhsan80@gmail.com

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD. : SDN 236 Laoli  
SMP. : SMP 1 Malili  
SMA. : SMA 1 Malili  
Perguruan Tinggi. : Stisipol Veteran Palopo